

## ABSTRAK

Pekerjaan sebagai seorang nelayan sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini berdasarkan pada konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dicanangkan pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada warganya secara adil dan merata. Upaya-upaya pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan nelayan yaitu dengan memberikan bantuan premi asuransi, pemerintah akan memberikan tanggung jawabnya dengan memastikan perlengkapan keselamatan para nelayan dalam melakukan penangkapan ikan, memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dan pemerintah pun akan memberikan bantuan hukum untuk para nelayan yang mengalami suatu masalah saat penangkapan ikan.

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan program perlindungan hukum terhadap keselamatan nelayan di Kota Probolinggo. Pemberian perlindungan hukum akan keselamatan para nelayan di Kota Probolinggo sudah dipenuhi dengan baik akan tetapi ada beberapa kendala yang mengakibatkan para nelayan ini tidak mendapatkan perlindungan hukum terutama akan bantuan premi asuransi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dikantor Dinas Perikanan Probolinggo. Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu dititik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktek yang terjadi dilapangan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu pemerintah telah memberikan bantuan hukum terhadap keselamatan nelayan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku. Khususnya bantuan premi asuransi, tetapi ada beberapa hal yang mengakibatkan bahwa tidak semua nelayan mendapatkan bantuan premi asuransi karena kesadaran nelayan untuk melaksanakan program tersebut masih sangat kurang.

Kata kunci : nelayan, bantuan premi asuransi, kesejahteraan